

Peran Lingkungan Melalui Dukungan Masyarakat dan Pejabat Publik Terhadap Implementasi Kebijakan Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar)

¹Emiraldo Win Pazqara, ²E. Gudonohadi

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

¹emiraldowinp@unwiku.ac.id

ABSTRACT

Writing this scientific paper aims to raise the discussion about the role of the environment through the support of the community and public officials in influencing the implementation of policies for handling PGOT (Beggars, Homeless and Abandoned People) in Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis, it can be confirmed that the policy for handling PGOT in Banyumas Regency received a positive response from the environment, namely the community and government officials. So that with strong support from the environment, the policy for handling PGOT in Banyumas which was confirmed through Perda number 16 of 2015 concerning community diseases is getting better in suppressing social problems in the Banyumas Regency area.

Keywords: Environment, Policy, PGOT

A. PENDAHULUAN

Beragam permasalahan yang muncul di suatu wilayah memicu dibuatnya suatu kebijakan sebagai formula atau obat yang diharapkan dapat menanggulangi atau setidaknya meminimalisasi dampak dari permasalahan tersebut. Hal itu merupakan wujud tanggung jawab moral dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap urusan dan kepentingan warga masyarakat. Dengan demikian diharapkan kedekatan antara masyarakat dengan *stakeholders* akan tetap terjaga dengan baik melalui kebijakan-kebijakan yang populis dan berpihak kepada masyarakat itu sendiri.

Sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, kemiskinan merupakan fenomena yang cenderung kompleks karena berdampak ke segala

aspek. Beragam sudah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, mulai dari BOS untuk pendidikan, BLT, Raskin, Pemberdayaan UMKM, sampai kenaikan gaji buruh (Sartono dan Pazqara, 2017:1). Hal ini menunjukkan adanya upaya serius bagi pemerintah untuk berupaya memecahkan permasalahan yang dianggap menjadi momok sedari awal negara Indonesia berdiri.

Salah satu dari sekian banyak dampak dari kemiskinan adalah munculnya fenomena PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar), yang menurut Banfield (dalam Nur melalui situsnya <http://id.netlog.com/ArifNoer/blog/blogid=5682>) kemunculan PGOT ini diinisiasi oleh tingkah laku dan budaya masyarakat kelas bawah yang tercermin melalui sikap pasrah, malas, tidak ingin berinovasi atau melakukan perubahan untuk perbaikan hidup, serta tidak mau berusaha dan cenderung ingin meraih kesenangan hidup secara instan. Maka dari itu perilaku yang terlihat dalam profesi seperti pengemis, gelandangan, pengamen dan yang sejenisnya tersebut mencerminkan perilaku miskin yang disebut dengan penyakit masyarakat, yang notabene perilaku tersebut banyak dijumpai di lingkungan masyarakat kelas bawah.

Sebagai salah satu wilayah yang juga mengalami masalah penyakit masyarakat terkhusus gelandangan, pengemis, dan orang terlantar, Kabupaten Banyumas turut berupaya untuk menanggulangi dan menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas. Melalui upaya penertiban dan pembinaan yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dan ketenteraman serta keindahan wilayah, dan sekaligus sebagai bentuk advokasi atau dukungan terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan kebijakan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 tentang penyakit masyarakat.

Implementasi dari perda ini tentu diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah kemiskinan di Kabupaten Banyumas beserta dampak yang menyertainya. Oleh karena itu, selain adanya mekanisme koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait untuk mensukseskan perda ini, yang tidak kalah penting adalah peran dari variabel di luar kebijakan atau lingkungan melalui dukungan serta komitmen dari stakeholders serta masyarakat itu sendiri sehingga tujuan utama dari kebijakan ini dapat tercapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang peran

lingkungan melalui dukungan masyarakat dan pejabat publik dalam mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) di Kabupaten Banyumas.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik penetapan informan menggunakan metode *Purposive Sampling*.

C. PEMBAHASAN

Untuk memperoleh gambaran tentang implementasi kebijakan penanganan PGOT di wilayah Kabupaten Banyumas, yang berkaitan dengan peran lingkungan yang mempengaruhi jalannya kebijakan, akan dijabarkan melalui item-item sebagai berikut:

a. Dukungan Publik

Berdasarkan hasil penelitian, dari aspek lingkungan kebijakan, yang dilihat dari respon publik terkait suatu kebijakan, maka kebijakan pencegahan penyakit masyarakat khususnya penanganan PGOT di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan mendapatkan dukungan yang cukup positif dari masyarakat utamanya mereka yang mengeluhkan keberadaan pengemis dan juga pengamen yang ada di jalan. Implementasi kebijakan pencegahan penyakit masyarakat khususnya penanganan PGOT yang berlandaskan pada aturan perda nomor 16 tahun 2015 di Kabupaten Banyumas mendapat dukungan yang cukup membanggakan dari masyarakat pengguna jalan yang menganggap dengan adanya sanksi tegas yang mengikat kedua belah pihak baik pemberi maupun peminta-minta akan memberikan efek jera. Termasuk dengan adanya sanksi tegas akan memberikan jaminan keamanan dari pengendara motor/mobil di jalan dari gangguan maupun tindak kriminalitas dari para PGOT tersebut.

Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa dukungan publik cukup positif dilihat dari sebagian besar masyarakat yang setuju dengan aturan khusus penanganan PGOT di Banyumas ini. Termasuk juga sudah terjalin kesepahaman antara masyarakat dengan pihak terkait untuk mensukseskan perda dimana masyarakat sudah mulai pro aktif melakukan pelaporan di satu sisi, dan di sisi lain pihak terkait memberikan kemudahan fasilitasi bagi masyarakat yang melakukan pelaporan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini sehingga pelaporan masyarakat akan lebih mudah

ditindaklanjuti. Ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sekaligus sebagai wujud pemberian pelayanan prima dari pemerintah kepada masyarakat.

Namun adanya efek atau dampak dari diterapkannya aturan dalam perda ini semisal terjadinya mobilisasi PGOT ke wilayah lain merupakan suatu konsekuensi logis dari suatu kebijakan yang pasti akan selalu ada dan memberi warna terhadap kebijakan itu sendiri. Termasuk adanya penolakan dari sebagian kecil masyarakat, khususnya mereka yang terdampak dari kebijakan tersebut yakni sasaran atau target kebijakan juga merupakan suatu hal yang wajar dan manusiawi karena pada dasarnya suatu kebijakan tidak akan menguntungkan semua pihak. Jadi ketika suatu kebijakan berbenturan dengan budaya atau adat yang sudah melekat erat di masyarakat, dan ketika suatu kebijakan mengganggu atau merugikan mata pencaharian masyarakat tertentu, maka akan mendapatkan resistensi dari masyarakat yang terdampak itu.

b. Dukungan dan Komitmen dari Pejabat Atasan

Diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyakit masyarakat di Kabupaten Banyumas diinisiasi dari MOU atau kesepakatan tentang Penanganan Permasalahan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) dan Psikotik Secara Terpadu di Wilayah Perbatasan Jawa Barat Bagian Timur dan Jawa Tengah Bagian Barat yang merupakan hasil Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) antar kepala daerah pada tahun 2014 yang juga diikuti oleh Bupati Banyumas Achmad Husein.

Kesepakatan ini dibangun antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota dari masing-masing provinsi yakni sebanyak 19 pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah salah satunya. Adapun secara rinci pemerintah kabupaten/kota tersebut diantaranya adalah Pemkab Kuningan, Pemkab Indramayu, Pemkab Cirebon, Pemkot Cirebon, Pemkab Majalengka, Pemkab Subang, Pemkab Ciamis, Pemkot Banjar, dan Pemkab Pangandaran untuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Adapun untuk Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah Pemkab Brebes, Pemkab Cilacap, Pemkab Tegal, Pemkab Pekalongan, Pemkab Banjarnegara, Pemkab Banyumas, Pemkab Purbalingga, Pemkab Pemasaran, Pemkot Tegal dan Pemkot Pekalongan.

Bupati Banyumas sebagai pihak ke 17 bersama-sama dengan pihak lain yakni para kepala daerah lain menandatangani kesepakatan untuk membangun komitmen penanganan permasalahan PGOT dan psikotik jalanan di wilayah masing-masing. Adapun ruang lingkup dari kesepakatan bersama ini mencakup:

1. Bidang Kesehatan yaitu peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) dan Psikotik Jalanan;
2. Bidang Sosial yaitu peningkatan pelayanan sosial bagi Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) dan Psikotik Jalanan;
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yaitu penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait dengan masalah Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) dan Psikotik Jalanan.

Dari kesepakatan yang dibangun Bupati Banyumas melalui Rakornis 2014 dan dukungan dari DPRD untuk penanganan PGOT menunjukkan komitmen mereka untuk mensukseskan penanganan penyakit masyarakat di Kabupaten Banyumas. Bukti dukungan tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas.

Wujud komitmen dan dukungan dari pejabat tinggi sangat penting tentunya bagi sebuah kebijakan sebagai penguat dari kebijakan tersebut. Diharapkan dengan adanya dukungan pejabat tinggi dengan legalitas yang dimilikinya, kebijakan penanganan PGOT di atas kertas tentunya tidak akan menemui hambatan dan tantangan yang berarti karena sudah menjadi komitmen dan tuntutan semua pihak dan elemen masyarakat yang didukung melalui suatu aturan khusus.

Kemudian terkait dengan dukungan pejabat publik terhadap kebijakan, maka kebijakan pencegahan penyakit masyarakat khususnya penanganan PGOT dalam bentuk aturan yaitu Perda Nomor 16 Tahun 2015 didukung oleh Bupati Banyumas dan DPRD Banyumas, sehingga kebijakan ini menjadi lebih kuat dan memenuhi unsur legal formal. Artinya ketika kebijakan ini diimplementasikan di lapangan maka tidak akan mudah digoyang dan dianulir oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menyetujui kebijakan tersebut.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan PGOT di Kabupaten Banyumas mendapatkan respon positif dari masyarakat, termasuk mendapatkan dukungan dan komitmen dari pejabat pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan anggota DPRD. Sehingga dengan adanya dukungan yang kuat dari lingkungan menjadikan kebijakan penanganan PGOT di Banyumas melalui Perda nomor 16 tahun 2015 menjadi semakin kuat dan efektif dalam menekan persoalan sosial di wilayah Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat.
- Rohman, Didik Fatkhur, *et al.* 2013. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi Kasus pada Disdukcapil Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1, No. 5. Hal. 963-964.
- Sartono & Emiraldo Win Pazqara. 2017. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Universitas Wijayakusuma. Purwokerto.
- Syafi'ie, Inu Kencana, *et al.* 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, edisi kedua. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Wahab, Solihin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT Bina Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.